

# Rasakan

## Klaster (Baru) Pariwisata

ANGIN segar baru saja dihembuskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, dengan mempersilahkan para pelaku usaha membuka kembali usaha mereka. Namun juga diingatkan bahwa protokol kesehatan untuk menangkal Covid-19 mutlak harus tetap dilaksanakan oleh para pengelola objek wisata, termasuk menerapkan R-Code untuk keperluan tracing. Parapelaku usaha pariwisata juga sangat antusias menyambutnya, karena industri pariwisata dinilai sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Ternyata dinamika Covid-19 berubah sangat cepat, sehingga muncul kekhawatiran bahwa pariwisata bisa memunculkan klaster baru Covid-19. Hal itu seperti diungkapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (6/7) lalu. Diingatkan lagi, bahwa pembukaan kembali objek wisata harus diimbangi dengan penyiapan skenario yang matang. Termasuk kemungkinan munculnya kasus baru dari objek wisata, hotel dan restoran. Pencegahan penyebaran Covid-19 tidak sekadar pintu masuk objek wisata dijaga oleh TNI, Polri, dan Satpol PP.

Pernyataan Ngarsa Dalem tersebut sangat beralasan, mengingat data dan fakta menunjukkan masih ada warga terpapar virus Korona setelah kontak langsung dengan warga dari luar daerah, baik karena bepergian ke luar daerah maupun pulang dari daerah zona merah. Akibatnya, terjadi imported case di DIY.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Virus Korona, Berty Murtiningsih, juga mengungkapkan mayoritas kasus positif Covid-19 di DIY saat ini karena punya riwayat kontak dengan warga positif Covid-19 dari luar daerah. Bahkan diperkirakan kasus tersebut sudah menunjukkan adanya transmisi lokal.

Hasil pantauan di sejumlah objek wisata di Gunungkidul juga menunjukkan bahwa sebagian masih mengabaikan protokol kesehatan. Ada pengunjung tanpa masker, berdesakan, dan tidak ada pengawasan ketat tentang asal wisatawan. Ini tentu sangat membahayakan bagi pengunjung lain dan masyarakat sekitar objek wisata. Berangkat dari kenyataan tersebut, tentu tidak berlebihan kalau Gubernur DIY khawatir, pariwisata akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

Memang, beberapa pelaku usaha pariwisata sudah menyatakan siap melaksanakan prasyarat yang diminta oleh Gubernur DIY, terkait protokol kesehatan dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Bahkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Dedy Pranowo Eryono menyatakan bahwa pihaknya sudah sepakat menerapkan berbagai ketentuan untuk mewujudkan Peradaban Baru Jogja Wajar Anyar, dengan mengedepankan jaminan layanan yang mengutamakan keamanan, kebersihan dan kesehatan.

Itu semua, tentu bukan jaminan tidak akan ada klaster (baru) Covid-19. Dalam kondisi saat ini, apakah Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY semata-mata hanya akan mengejar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata ataukah tetap mengutamakan keamanan, kenyamanan dan kesehatan warganya?

## Manusia dan 'Kamanungsan'

*Manungsa kang duwe kayun (sedyu urip), kudu duwe cita-cipta luhur, paham lan nindakake limang prakara, yaiku suc, jujur, tulus, wani, lan adil. Wong kang wis bisa ngumiki limang prakara, sinebut priyantun kang wicaksana, tansah mulat sarira mangrasa wani, bisa rumangsa yen manungsa iku winates uga tepa salira, bisa ngrasakake susah lan larane wong liya.*

**PENDAPAT** pemerhati budaya Jawa, Drs H Budiono Herisatoto yang pernah diungkapkan dalam tulisan *Eling lan Waspada* (Adiluhung KR, 2018) itu, terasa sangat pas dengan kondisi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Terlebih dengan munculnya Stigma Sosial Covid-19.

Pemberlakuan pembatasan sosial dan pembatasan jarak antar fisik manusia selama ini terkesan telah melunturkan nilai-nilai sosial dan hubungan kekeluargaan antarwarga. Terlebih hubungan dengan warga yang kena musibah positif Covid-19. Sikap tepa salira, bahkan rasa kamanungsan (perikemanusiaan), seolah juga mulai luntur. Bahkan sejumlah media sosial telah menyebutkan adanya kecenderungan Stigma Sosial Covid-19.

Di satu sisi, kita saat ini memang harus meningkatkan kepedulian, kekerabatan, dan paseduluran. Namun di sisi lain, pembatasan-pembatasan ini mutlak harus dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat, untuk memutus rantai penyebaran virus Korona.

Terkait munculnya Stigma Sosial Covid-19, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Kulonprogo memposting penjelasan bahwa stigma sosial adalah konotasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang karena menyangkut penyakit tertentu. Dalam kondisi saat ini, dapat diartikan penyandang positif Covid-19. Mereka antara lain dijauhi dan dikucilkan, mendapat diskriminasi dalam masyarakat, tidak dapat mengakses fasilitas tertentu, dan diberi cap negatif lainnya.

Kalau stigma sosial tersebut dibiarkan berkembang liar di masyarakat, sungguh merupakan sanksi sosial yang sangat berat bagi pasien positif Covid-19 beserta keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kalau sampai terjadi stigma sosial berlebihan, tidak menutup kemungkinan muncul kecenderungan manusia-manusia yang mulai kehilangan tepa salira, bahkan hilang rasa kamanungsane.

Untuk mengurangi dampak stigma tersebut, bermunculan pula berbagai ajakan lewat media sosial, agar kita tidak panik kalau ada warga positif Covid-19, karena penularannya terjadi melalui droplet (ludah atau air liur), bukan melalui udara. Sebaliknya mereka jangan dikucilkan (distigma), tetapi seharusnya mereka diberi dukungan fisik, mental dan spiritual. Harus didukung pula lewat gotongroyong, bantuan logistik, dan dukungan psikis lewat media online. Tentu saja itu semua tetap disertai kewaspadaan dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

■ jb

## Hasto Wardoyo

# 'Family Planning' Kebijakan Tepat Indonesia

**DOKTER** Hasto Wardoyo SpOg(K) adalah sosok yang selalu *ajur ajer* di manapun berada. Berani menanggalkan zona nyaman sebagai dokter spesialis kandungan dan pengusaha alat kedokteran, untuk mengemban amanah sebagai Bupati Kulonprogo. Hasto memahami di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.

Sebagai putra daerah yang dilahirkan di Kulonprogo 30 Juli 1964, Hasto sangat mengenal wilayah dan masyarakat, ketika memimpin kabupaten di bagian barat Sungai Progo di DIY tersebut. Memimpin Kabupaten Kulonprogo periode 2011-2016 dan setengah periode 2016-2019, dengan gebrakan yang cukup fenomenal: Bela Beli Kulonprogo dan Tomira.

Semua untuk mengangkat kesejahteraan warga Kulonprogo. Semua dilakukan karena ia memahami bahwa unit terkecil masyarakat Indonesia adalah keluarga. Karena itu, segala daya dilakukan untuk menyejahterakan dan membuat keluarga yang dipimpinnya menjadi bahagia.

Hasto juga mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak industri batik lokal, mewajibkan pejabat dan PNS mengenakan batik motif *gebleg renteng*, batik khas Kulonprogo, pada hari tertentu. Meminta Bulog dalam mengelola beras raskin dengan membeli beras produk petani Kulonprogo, mengembangkan air PDAM sebagai air mineral AirKu. Untuk mendukung dan mengembangkan UMKM, ia mengakuisisi Alfamart dan Indomart secara bertahap, lewat koperasi.

Namun di tengah perjalanan, Hasto harus meninggalkan Kulonprogo.



Hasto Wardoyo bersama Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana dan anggota DPRD Kulonprogo Aris Syarifudin.

Pria yang menghabiskan pendidikan SD-SMA di Kulonprogo itu dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menahkodai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.

BUKAN karena menjabat sebagai Kepala BKKBN semata, jika *focus of interest* Hasto Wardoyo pada pembangunan keluarga sangat luar biasa. Kepedulian pada unit terkecil masyarakat ini sudah dilakukan sejak awal. Maka, ketika semua orang berseru akan bonus demografi sebagai usia potensial produktif yang harus mendapat perhatian penuh, Hasto pun mengingatkan kepedulian kita akan bonus demografi dengan usia konsumtif. Artinya, semua pihak harus memahami untuk dapat mengendalikan bonus demografi dari sisi konsumtif.

Dalam suatu bangsa, sebut alumnus FK UGM itu, unit analisis terkecil adalah keluarga. "Jadi, Indonesia sudah tepat, *on the track* dengan membuat *family planning*, bukan *district planning* atau *village planning* untuk menuju kesejahteraan. "Sebagai dokter, adalah

sangat tepat untuk mengetahui sebab penyakit, sehingga tepat resep yang diberikan," jelas suami dr Dwikesworo Setyowireni SpA itu.

Dokter Teladan 1992 atas pengabdian di Puskesmas Kahala Kabupaten Kutai Katimantan Timur itu mengingatkan bahwa program keluarga adalah basis. Bahkan kalau problem keluarga ini bisa diselesaikan, selesaikan masalah. Kalau sukses dan menjadi keluarga produktif, maka tidak hanya bisa meraih *welfare* namun juga *happiness*.

Diambilkan mengenai angka kematian ibu (AKI) melahirkan. Jika suami ditanya tentu akan menjawab: "Janganlah istri meninggal ketika melahirkan. Kalau bisa, sampai titik darah penghabisan diperjuangkan". Artinya, keluarga itu mengharap *zero maternity*, nol kematian ibu melahirkan. "Ketika kita bertanya kepada Bapak Dukuh, berapa jumlah kepala keluarga (KK) dan berapa AKI melahirkan? Maka jawabannya ada 200 KK dan kalau bisa jangan sampai ada AKI."

Ketika di tingkat kecamatan hal serupa

ditanyakan, jawaban Pak Camat mungkin sudah berbeda. "Tahun kemarin ada 3 AKI, kalau bisa tahun ini 1 saja, jangan bertumbuh. Dan di tingkat kabupaten, pertanyaan serupa, jawabannya mungkin juga masih dengan target, yakni menurunkan AKI. Itu artinya, ada visi tidak sama antara keluarga dan tingkat kecamatan apalagi kabupaten, soal AKI," tandas Hasto yang sempat masuk IPB dan ingin menjadi dokter hewan.

Menurut Hasto Wardoyo, tugas BKKBN sekarang ini super berat, karena mengendalikan bonus demografi sebagai usia konsumtif. Setelah itu, mengarahkan dalam unit analisis keluarga yang sejahtera tetapi juga harus bahagia.

*Mmllennium development goals* (MDGs) belum selesai, sudah harus mengikuti *sustainable development goals* (SDGs). Ibaratnya, anak kecil baru lulus SD sudah harus mengikuti kuliah," ungkapnya.

Untuk semua itu, program penundaan usia nikah menjadi salah satu alasan biologis yang dipahami. Karena secara biologis, Allah menciptakan organ reproduksi yang belum sempurna dan bila belum usia 20 tahun sudah terpapar *sex intercourse* akan berinvestasi terjadinya kanker mulut rahim. "Bahasannya biologis, ilmu Tuhan. Jangan dicampuradukkan dengan sosiologi dengan mengatakan A itu menikah muda, bahagia, tidak bercerai dan lainnya," tandas Hasto Wardoyo. ■ (Fadmi Sustiw)

## Komjen Boy Rafli Amar

# Berdakwah, Merawat Negara



Komjen Boy Rafli Amar berbincang dengan Gus Miftah, Pengasuh Ponpes Ora Aji.

**PERAN** alim ulama sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui ajaran dan taushiyah yang diberikan, diharapkan tak hanya membangun akhlak mulia masyarakat. "Melalui peran ulama dan tokoh agama, kita berharap rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat juga akan meningkat. Sambil berdakwah, sekaligus merawat negara." Kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Dr Boy Rafli Amar MH.

Boy Rafli menambahkan, hari ini kita melihat berbagai ideologi masuk. Bahkan ada ideologi yang tak sesuai ajaran Pancasila dengan luluasa masuk dan mempengaruhi generasi muda. "Kondisi ini harus kita waspadai bersama. Jangan sampai generasi penerus ini lupa dengan ke-Indonesia-an, termasuk generasi muda Islam. Leluhur dan tokoh-tokoh bangsa serta ulama telah mewariskan dasar negara yang bagus sekali dengan adanya kemajemukan, dengan adanya perbedaan," papar Boy Rafli.

Melihat kondisi yang berkembang, BNPT akan bekerja

sama dengan tokoh-tokoh agama untuk menggemakan dakwah sekaligus membangun nasionalisme serta semangat Keindonesiaan. Salah satunya BNPT bekerja sama dengan Gus Miftah yang selama ini dikenal sebagai kiai nasionalis yang dalam dakwahnya selalu menjunjung semangat menghargai kemajemukan.

Kunjungan Boy Rafli di Ponpes Ora Aji, selain mempererat silaturahmi, juga untuk menyamakan visi dan misi mengenai cara beragama yang diiringi wawasan kebangsaan, disertai dengan kegiatan-kegiatan melalui media dakwah. "Maraknya paham ideologi yang kini masuk dan meluas di kalangan masyarakat menimbulkan keresahan akan adanya beragam ideologi yang disalah-artikan hingga mampu merusak jati diri bangsa. Untuk itu, sudah menjadi tugas pemerintah dan masyarakat dalam upaya menegakkan nilai kebangsaan," jelas mantan Kadiv Humas Polri itu.

Kepala BNPT ini mengungkapkan, semangat kebangsaan harus selalu dirawat.

Menurutnya, Ulama memainkan peran penting dalam upaya tersebut yakni dengan memberikan pemahaman agama yang turut dilandasi nilai luhur bangsa. "Jadi ke-Indonesia-an ini kan merupakan sebuah kondisi yang harus kita rawat bersama-sama, di mana peran dari Ulama merupakan salah satu dalam konteks perspektif keagamaan, bisa memberikan sebuah pencerahan, peningkatan kualitas akhlak, terlebih kecintaan kepada negara ini," ucap Boy Rafli Amar.

Menurutnya, terorisme masih menjadi ancaman di Indonesia. Bahkan ketika terjadi pandemi Covid-19, gerakan terorisme tidak mengalami *lockdown*. "Ada indikasi mereka tetap bergerak. Kalau dikatakan tidak ada, ternyata ada yang melakukan tindakan hukum. Artinya, dalam keadaan pandemi, mereka tidak berhenti. Karena itu, kewaspadaan dari semua masyarakat harus kita kembangkan," tandasnya.

Petinggi Polri berdarah Minang itu berpendapat, media sosial menjadi celah masuknya paham dan ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur warisan ulama dan para pendiri bangsa. Persebaran konten sosial media yang bertentangan dengan ideologi dan ajaran agama sangat masif. Dunia maya merupakan dunia tanpa batas.

"Belum tentu konten yang mereka sebarakan itu dibuat di Indonesia. Tetapi yang menjadi korban adalah anak-anak muda Indonesia. Mereka mendapat janji-janji yang keliru. Contohnya, mereka dijanjikan jika datang ke sana dibayar 2 ribu dolar perbulan. Tetapi nyatanya tidak. Bahkan mereka menderita di sana," ungkap Boy Rafli Amar.

Di antara masyarakat Indonesia yang bergabung dengan kelompok terorisme di Timur Tengah, lanjut Komjen Boy Rafli, sebagian adalah anak-anak asal Indonesia usia di bawah 10 tahun. Bahkan saat ini ada seratusan anak Indonesia ada di *camp* pengungsian. "Kalau sudah

begini, siapa yang bertanggungjawab? Ini pasti orangtuanya yang terkena godaan. Seolah-olah itu merupakan wilayah perjuangan, berjihad, sebagai bentuk amaliah mereka. Ada janji di situ, masuk surga, matinya mati syahid. Mereka tidak menyadari. Menurut mereka, membela kepentingan kelompok tertentu. Padahal lebih bagus kita membela negara saja. Membela negara sendiri, di sini. Banyak hal yang bisa dikerjakan," tegasnya. ■ Dar

## IKLAN BARIS

### BARANG HILANG

- Hilang BPKB Nopol AB 1708 SY a/n Irene Suheriani Suparman d/a Jl. Adisucipto Km 7,5 Santan Depok Sleman
- Hilang BPKB Nopol AB 1889 BN a/n Fitri Asih, SE d/a Mesan No.52 RT 02/31 Sinduadi Mlati Sleman YK
- Hilang BPKB AB 6417 AS a/n Andy Sulistyanto ST d/a Danunegeran MJ 3/1039 RT 067/018 MJ Yogyakarta
- Hilang BPKB No.L-108421091 a/n Ummi Muthmainnah d/a Keparakan Kidul MG I/1243 RT 57/13 Yogyakarta
- Hilang BPKB Noka MHIJFN116BK068266/AB-4287-AE an.Ernawati, Karangasem 4/27 Pandowoharjo Sleman
- Hilang BPKB Noka MHIJFN116BK068266/AB-4287-AE an.Ernawati, Karangasem 4/27 Pandowoharjo Sleman
- Hilang BPKB Noka MHIJFN116BK068266/AB-4287-AE an.Ernawati, Karangasem 4/27 Pandowoharjo Sleman
- Hilang BPKB No. P01794800 – AB 5213 KI a/n Adi Putra Tunya d/a Bintaran Kidul MG II/91 Wirogunan Mergangsan YK
- Hilang BPKB No. P01794800 – AB 5213 KI a/n Adi Putra Tunya d/a Bintaran Kidul MG II/91 Wirogunan Mergangsan YK
- Hilang BPKB No. P01794800 – AB 5213 KI a/n Adi Putra Tunya d/a Bintaran Kidul MG II/91 Wirogunan Mergangsan YK